

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah elemen yang penting bagi perusahaan. Laporan keuangan merupakan pelaporan untuk menunjukkan keadaan keuangan sebuah perusahaan periode tertentu dan diperuntukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (Andreas *et al.*, (2017). Pihak-pihak yang berkepentingan termasuk didalamnya ada investor dan kreditor. Pihak- pihak ini lebih berfokus kepada informasi pelaporan laba perusahaan. (A.Septiana, 2019) menyatakan bahwa pelaporan laba perusahaan ini berfungsi untuk mengevaluasi dan menilai kinerja perusahaan, mengestimasi dan memprediksi pencapaian laba dalam jangka panjang, dan menafsirkan keuntungan dan kerugian terhadap investasi dan pemberian hutang perusahaan. Agar ke tiga aspek ini dapat diwujudkan maka pelaporan keuangan perusahaan harus bersifat realible, akuntable, dan relevan.

Dengan mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pihak manajemen leluasa untuk menentukan metode yang bagaimana yang tepat untuk sebuah perusahaan yang dikelolanya. Termasuk didalam yaitu prinsip konservatisme akuntansi. (Mumayiz *et al.*, 2020) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi merupakan sikap pesimistik didalam menghadapi adanya ketidakpastian laba atau rugi dengan memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya, dengan

maksud agar nilai aset menurun sedangkan nilai hutang atau kewajiban bertambah.

Dalam ketidakpastian penilain aset dan kewajiban menggunakan metode historis sebagai pengukuran untuk meminimalisir terjadinya kelebihan aset bersih (Juliarto, 2015). Dengan penggunaan metode ini secara tidak langsung sebuah perusahaan menerapkan prinsip konservatisme, akan tetapi konservatisme akuntansi tidak diatur lagi di dalam *International Financial Report Standards (IFRS)*, karena didalam IFRS lebih menekankan relevannya nilai informasi akuntansi untuk masa mendatang, sedangkan konservatisme lebih menekankan pada keandalan informasi akuntansi (Mumayiz *et al.*, 2020).

Zelmiyati (2014) menyatakan prinsip konservatisme di dalam IFRS digantikan dengan prinsip *prudence* yaitu mengurangi pengakuan yang tinggi terhadap kewajiban dan beban pada laporan keuangan. Mumayis *et al* berpendapat, *professional judgment* akan meningkatkan optimisme suatu perusahaan dikarenakan perusahaan dapat mengakui perubahan nilai suatu akun berdasarkan *fair value* dan optimis perubahan nilai tersebut akan terealisasi, hal itu dapat berpotensi terjadinya manipulasi pelaporan keuangan (Mumayiz *et al.*, 2020).

Fenomena ini di latar belakang oleh kasus manipulasi keuangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 salah satunya yaitu PT Garuda Indonesia. Manajemen PT Garuda Indonesia Tbk disinyalir melakukan manipulasi atas penyajian laporan keuangannya. Garuda Indonesia

mencatatkan net income pada 2018 setelah beberapa bulan berturut-turut mengalami kerugian. Income yang diperoleh dikarenakan terdapat piutang yang dicatat sebagai pendapatan. Tahun 2018 Garuda Indonesia memperoleh laba bersih sebesar \$809,85 ribu atau Rp11,33 miliar. Laba tersebut timbul karena melambungnya pendapatan usaha lain-lain dengan total mencapai \$306,88 juta. Karena hal tersebut, terdapat 2 komisaris yang tidak mau menandatangani laporan keuangan Garuda 2 komisaris tersebut keberatan mengenai pengakuan pendapatan yang merupakan transaksi perjanjian kerja sama mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dengan PT Citilink Indonesia. Pengakuan pendapatan ini tidak sesuai dengan PSAK no. 23, karena manajemen Garuda Indonesia mencatat pendapatan dari Mahata dengan nilai \$ 239.940.000, yang di dalamnya terdapat nilai \$28.000.000 yang merupakan bagian bagi hasil yang diperoleh dari PT Sriwijaya Air. Uang tersebut masih berbentuk piutang, akan tetapi diakui Garuda Indonesia sebagai pendapatan (<https://finance.detik.com/>).

Fenomena selanjutnya di lansir dari liputan6.com Erick Thohir saat baru menjadi Menteri BUMN pada Oktober 2019 mendapatkan cobaan yang cukup berat. Erick langsung dihadapkan pada persoalan dugaan korupsi kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu. Pada awal 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan angin segar dalam penyelesaian permasalahan yang dialami Jiwasraya.

"Kita tidak mau BUMN dianggap melarikan diri, walaupun ini (kejadian sejak) 2006, kita tidak bisa memisah-misahkan karena ini negara kita, jadi apa yang terjadi dulu dan sekarang, saya yakin pemerintah selalu mencari solusi," ujar Erick.

Kerugian negara akibat kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya mencapai Rp 16,8 triliun. Jumlah perhitungan tersebut mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Hexana Tri Sasongko mengatakan, kerugian temuan BPK hanya sebatas kerugian investasi, sehingga masih terdapat kerugian yang harus ditanggung pemegang saham. "Nilai tersebut belum meliputi seluruh kerugian Jiwasraya (Rp16,8 triliun) belum final. BPK sudah melakukan audit investigasi terhadap kerugian negara. Total kerugian negara terkait investasi senilai Rp 16,8 triliun," ujarnya saat video conference di Jakarta, Minggu (4/10/2020). Adapun, jika dihitung-hitung total kerugian diperkirakan mencapai Rp 37 triliun. Kerugian tersebut membuat negara memutuskan menanggung sebagian. Manajemen baru dibantu konsultan independen telah menghitung kebutuhan dana yang diperlukan untuk penyelamatan pemegang polis," ucapnya. Di menambahkan, pemberian penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 22 triliun diutamakan untuk program penyelamatan [Jiwasraya](#). Sehingga dana tersebut bisa menyelesaikan semua masalah dan menyelesaikan semua kewajiban pembayaran polis kepada para nasabah.

Fenomena selanjutnya ada dari PT ASABRI Persero Fenomena selanjutnya tentang PT Asabri (Persero) mengakui kerugian perusahaan bersumber dari kesalahan pengelolaan investasi. Demi menahan laju kerugian investasi, jajaran direksi Asabri berkomitmen memetakan ulang aset. Direktur Utama Asabri, Sonny Widjaja, memaparkan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin. Dalam 20 menit awal, rapat dilakukan terbuka. Namun, setelah direksi Asabri memaparkan kondisi keuangan perusahaan, rapat yang sekitar tiga jam itu tertutup. Menurut Sonny, penurunan kinerja investasi terjadi karena nilai saham dan reksa dana saham turun. Dalam laporan keuangan yang disampaikan ke Komisi XI DPR terungkap, total aset lancar Asabri turun dari Rp 35,52 triliun pada akhir 2018 jadi Rp 21,99 triliun di akhir 2019. Nilai aset keuangan juga turun dari Rp 5,9 triliun jadi Rp 1,29 triliun selama kurun itu. Kasus pada Asabri juga ikut menyeret pengusaha nasional Benny Tjokro dan perusahaannya PT Hanson Internasional. Benny sendiri dalam waktu bersamaan, juga tersangkut kasus Jiwasraya, maka besar kemungkinan perusahaan menerapkan konsep *prudence* akuntansi.

Hal ini karena konsep *prudence* akuntansi adalah mengakui beban yang kemungkinan akan terjadi lebih dahulu sehingga mengakibatkan laba perusahaan di tahun yang bersangkutan lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi *prudence* akuntansi di Indonesia. Variabel Independen yang digunakan terdiri dari *Good Corporate Governance disclosure* dan *Firm Size*.

Variabel independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance Disclosure*. Variabel ini digunakan dengan alasan bahwa perusahaan diasumsikan secara berkelanjutan harus menjamin bahwa operasi yang dilakukan perusahaan tidak menyimpang dari norma-norma di dalam masyarakat dan bisa di legitimasi oleh pihak luar (Kusumawardani & Sudana 2017). Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pihak-pihak yang dapat mengawasi serta menekan perusahaan agar dapat melakukan *prudence* Akuntansi secara optimal. Permasalahan transparansi dan tanggung jawab / responsibilitas serta peran *Stakeholder* dalam menangani permasalahan dalam perusahaan sudah disebutkan dan diatur dalam *Good Corporate Governance (GCG)*. *Prudence* Akuntansi merupakan implementasi dari dua prinsip GCG yaitu responsibilitas dan transparansi.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Enni Harisa dkk (2019) yang meneliti *Effect of Quality of Corporate Governance Disclosure* dan Wilson E. Herbert (2021) yang meneliti *Corporate Governance Disclosure and Corporate Performance*. Meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan variabel yang diteliti, waktu dan lokasi penelitian.

Variabel independen yang kedua adalah *Firm Size* (Ukuran Perusahaan). Variabel ini dilakukan dengan alasan bahwa perusahaan dengan ukuran besar diasumsikan dengan jumlah aktiva dan tingkat pendapatan yang besar sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan memiliki masalah dan risiko yang lebih kompleks daripada perusahaan yang kecil, perusahaan yang berukuran besar akan dikenakan biaya politis yang tinggi sehingga untuk mengurangi biaya politis tersebut perusahaan menggunakan *Prudence* Akuntansi. Usbah dan N.S primasari (2020) Purnama dan Daljono (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *Prudence* akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh S.S Putri dan V. Herawaty (2020) yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *Prudence* Akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan variabel yang diteliti, waktu dan lokasi penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi *Prudence* Akuntansi dengan judul : **“Pengaruh *Good Corporate Governance Disclosure* dan *Firm Size* terhadap *Prudence* Akuntansi” (Studi**

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2016-2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana *Good Corporate Governance Disclosure* pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020.
2. Bagaimana *firm size* pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020
3. Bagaimana *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020
4. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance Disclosure* terhadap *Prudence* pada perusahaan sektor BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020.
5. Seberapa besar pengaruh *firm size* terhadap *prudence* pada perusahaan sektor BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020.
6. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance Disclosure* dan *Firm Size* terhadap *prudence* pada perusahaan sektor BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Good Corporate Governance disclosure* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
2. Untuk mengetahui *Firm Size* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
3. Untuk mengetahui *Prudence* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good corporate Governance Disclosure* terhadap *Prudence* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Firm Size* terhadap *Prudence* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance Disclosure* dan *Firm Size* terhadap *Prudence* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan, permasalahan serta tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini, penulis berharap dalam penelitian

ini dapat memberikan kegunaankedalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan oraktis dan teoritis

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi keuangan khususnya mengenai pengaruh Good Corporate Governance Disclsoure dan Firm Size terhadap Prudence. Serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masuka bagi perusahaan yang *listed* di BEI untuk memperhatikan Mekanisme *Good Corporate Governance dan firm size* dalam pentingnya pengungkapan *prudance* yang dilakukan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan antara kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada *stakeholder*.

3. Bagi Investor

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial , ekonomi, dan *good corporate governance* yang perlu diperhitungkan dalam investasi.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai *Good Corporate Governance Disclosure* dan *firm size* terhadap *Prudence*.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris di bidang akuntansi keuangan, mengenai pengaruh *good Corporate Governance disclosure* dan *FirmSize* terhadap *Prudence*. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan tambahan informasi, wawasan serta referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), saham OK (www.sahamOk.com), seputar Forex (<https://seputarforex.com>) dan situs resmi dari masing-masing perusahaan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2021 sampai dengan selesai.